

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Teori

2.1.1. Konsep Kolaborasi

Secara umum, kata “kolaborasi” mengacu pada jenis kerja sama ketika para mitra memiliki tujuan yang sama (Istiqomah, 2023). Kolaborasi juga dapat didefinisikan sebagai suatu jenis aktivitas sosial ketika individu terlibat dalam tugas-tugas tertentu dengan maksud untuk mencapai tujuan bersama melalui bantuan timbal balik dan saling memahami usaha satu sama lain. Definisi lain dari kerjasama adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah diputuskan dengan menugaskan pekerjaan atau tenaga kerja, bukan sebagai pembagian kerja melainkan sebagai unit kerja, yang semuanya difokuskan untuk mencapai tujuan. (Kurniati & Riyanta, 2018). Banyak ahli yang memiliki definisi yang beragam tentang kolaborasi. Misalnya, Emily R. La I mendefinisikan kolaborasi sebagai partisipasi kooperatif dalam kegiatan yang direncanakan. Sebaliknya, Jonathan (2004) mendefinisikan kolaborasi sebagai kegiatan yang sedang berlangsung dengan beberapa individu yang saling berinteraksi. Istiqomah (2023).

Dalam proses pengambilan keputusan kolaboratif, Chris Ansell Alison Gash (2007) menggambarkan kerja sama sebagai taktik peraturan pemerintah dan sebagai kebijakan. Hal ini bersifat formal, berorientasi pada konsensus, dan musyawarah dengan tujuan untuk menciptakan atau mengimplementasikan kebijakan.

publik, mengawasi inisiatif atau sumber daya publik. Sementara itu, Jacob (2023) mendeskripsikan kolaborasi sebagai proses sosial di mana individu saling mendukung satu sama lain dalam melakukan tindakan untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi melibatkan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai hasil yang sukses bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut, kerja sama digambarkan sebagai tindakan yang dilakukan secara kooperatif oleh beberapa orang untuk memenuhi keinginan tujuan bersama. Hal yang sama juga disampaikan oleh Bila & Saputra (2019), yang mendefinisikan kolaborasi sebagai kemitraan antara organisasi yang terlibat dalam saling mendukung dan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan, bertukar informasi, sumber daya, dan manfaat, serta berkolaborasi untuk membuat keputusan bersama untuk mengatasi berbagai masalah.

Definisi kolaborasi menurut kamus American Heritage adalah bekerja bersama, terutama untuk mengintegrasikan ide. Hal ini didasarkan pada penjelasan Gray (1989), yang menyatakan bahwa kerja sama adalah proses mental di mana pihak-pihak yang terlibat mengidentifikasi kendala perspektif masing-masing tentang apa yang dapat dilakukan dan bekerja untuk menyelesaikan perbedaan dalam cara mereka melihat suatu masalah. Menurut Munawaroh (2021), kolaborasi juga dapat digambarkan sebagai kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, kesamaan, dan tanggung jawab ketika orang-orang yang terlibat memiliki tujuan yang sama, sudut pandang, keinginan untuk berproses, saling menguntungkan, kejujuran, kasih sayang, dan rasa kebersamaan.

Tujuan utama kerja sama adalah untuk mencapai tujuan bersama melalui bantuan timbal balik. Bersama-sama, kerja sama dapat mempercepat pencapaian tujuan.

membantu mempercepat pencapaian tujuan bersama. Tidak disarankan untuk mengklasifikasikan tugas-tugas yang diselesaikan, bahkan ketika bekerja untuk mencapai tujuan-tujuan ini. Menurut Nawawi, kerja sama adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama melalui pendelegasian tugas; kerja sama bukan merupakan pembagian kerja, melainkan suatu unit kerja dengan tujuan yang sama untuk mencapai tujuan. Menurut Edward M. Marshal, kolaborasi adalah proses dasar kerja sama yang, dengan mencapai kepemilikan, konsensus, dan integrasi dalam semua aspek organisasi, menumbuhkan kepercayaan, integritas, dan terobosan (Munawaroh, 2021).

Tidak peduli berapa lama waktu berlalu atau berapa banyak pihak yang terlibat, kerja sama tim selalu menjadi hal yang penting ketika ada masalah yang melintasi atau melibatkan hubungan dengan pihak lain. Banyak individu, kelompok, dan organisasi yang terlibat dalam kolaborasi. Memahami fungsi lembaga-lembaga publik sangat penting ketika berkolaborasi. Oleh karena itu, tingkat organisasi sektor publik menjadi fokus penelitian kolaboratif yang semakin banyak dilakukan. Tenggang waktu untuk berkolaborasi cukup lama. Kolaborasi berbeda dengan kerja tim karena hal ini. Kolaborasi dapat dianggap sebagai proses yang sedang berlangsung dengan beberapa individu yang berinteraksi. Untuk membuat tugas pelaksanaan menjadi kewajiban bersama, diperlukan perencanaan kolaboratif. Hal ini sejalan dengan pernyataan Lindeke dan Sieckret bahwa kerja sama adalah proses yang sulit yang membutuhkan perencanaan strategis dan berbagi informasi.

Pertukaran informasi yang terencana dan terarah yang berubah menjadi kewajiban bersama (Fadli & Nurlukman, 2018).

Berdasarkan kriteria yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerja sama melibatkan proses kognitif di mana pihak-pihak yang terlibat mengidentifikasi dan mengatasi perspektif yang berbeda tentang suatu masalah, serta kendala pada perspektif masing-masing dari solusi yang mungkin. Istilah “kebersamaan”, “kerja sama”, “pembagian tugas”, “kesetaraan”, dan “tanggung jawab” juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan kolaborasi. Karakteristik ini dimiliki oleh orang-orang yang terlibat dalam kolaborasi, serta kesamaan tujuan, kebutuhan pemrosesan, kejujuran, kasih sayang, dan rasa kebersamaan.

2.1.2. Tata Kelola Kolaboratif

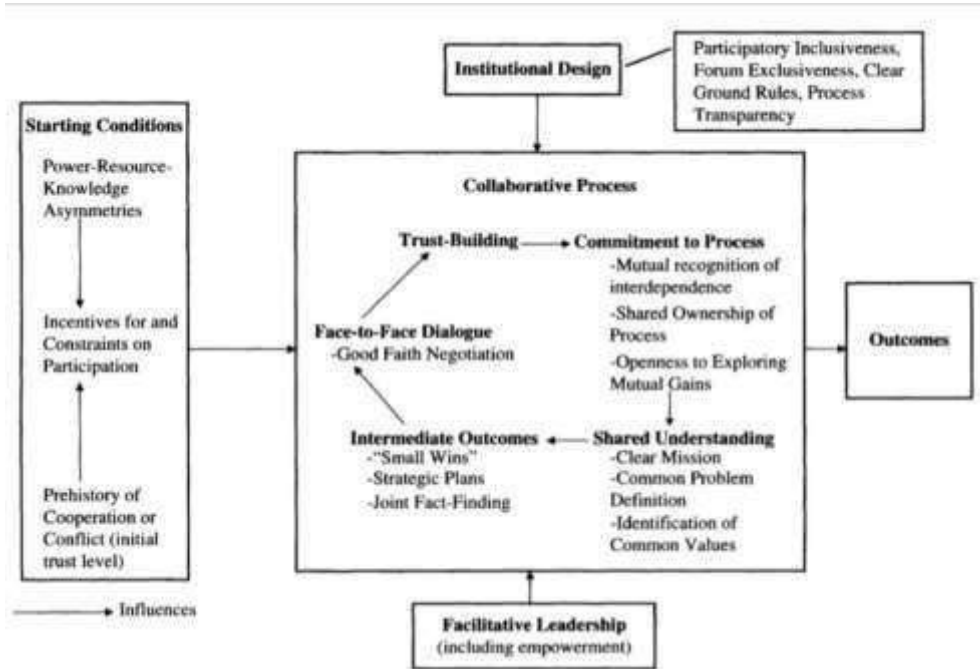
Pemerintah dapat berkolaborasi dengan dunia usaha, komunitas, institusi akademik, dan sektor masyarakat lainnya melalui penggunaan tata kelola kolaboratif. Keadaan awal, kelembagaan, kepemimpinan, proses kolaboratif, dan variabel yang mendorong dan menghambat penggunaan sumber daya alam adalah lima perspektif yang dapat digunakan untuk melihat tata kelola kolaboratif. Menurut Ciptaningsih dan Nurcahyanto (2018), tata kelola kolaboratif, dalam arti luas, merupakan proses yang menyatukan aktor negara dan non-negara untuk menyelesaikan masalah yang memengaruhi organisasi publik atau swasta, individu, atau keduanya.

Dua puluh tahun terakhir ini telah melihat perkembangan jenis tata kelola baru yang dikenal sebagai tata kelola kolaboratif Silayar (2021). Pendekatan tata kelola ini memusatkan beberapa pemangku kepentingan di satu lokasi untuk pengambilan keputusan dengan bantuan entitas publik. Untuk menentukan kondisi di mana tata kelola kolaboratif akan menjadi tindakan yang efektif, tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan pendekatan kontingen terhadap kolaborasi (Silayar, 2021).

Membuka peluang bagi para pemain eksternal untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan proses tata kelola dianggap penting bagi pemerintah. Abidin menjelaskan bahwa masyarakat dan sektor bisnis merupakan salah satu pemain lain yang terlibat dalam Paripurnawaty (2021). Oleh karena itu, pemerintah harus memasukkan tata kelola kolaboratif ke dalam tata kelolanya, sesuai dengan pendekatan ini. Menurut Paripurnawaty (2021), tata kelola kolaboratif digambarkan sebagai bentuk tata kelola yang melibatkan para pemangku kepentingan secara langsung di luar negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif dengan tujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan dan program publik melalui konsensus dan musyawarah (Ansell dan Gash, 2007).

Menurut Emerson dan Nabatchi (sebagaimana dikutip dalam Arrozaaq, 2016), *collaborative governance* didefinisikan sebagai proses dan kerangka kerja untuk mengelola kebijakan publik dan melibatkan aktor-aktor konstruktif secara langsung pada batas-batas lembaga publik, pemerintah dan masyarakat, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk memajukan kepentingan publik yang tidak dapat diwujudkan tanpa adanya partisipasi publik.

Munculnya tata kelola kolaboratif dapat disebabkan oleh politisasi peraturan, tingginya biaya, dan keterbatasan. Hal ini dilakukan sebagai penyeimbang terhadap kelompok kepentingan yang bersifat antagonis dan ketidakmampuan administratif untuk bertanggung jawab, terutama ketika otoritas para ahli dipertanyakan. Lebih jauh positifnya, ada pula yang berpendapat bahwa kemampuan kelembagaan dan pengetahuan yang berkembang juga merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kecenderungan menuju kolaborasi. Kolaborasi menjadi semakin diperlukan seiring dengan semakin terspesialisasi dan tersebarnya informasi serta infrastruktur kelembagaan yang semakin rumit dan saling berhubungan. Salah satu metrik pemersatu untuk semua elemen ini mungkin adalah meningkatnya “turbulensi” yang dialami para manajer dan pembuat kebijakan, seperti yang ditunjukkan oleh Gray (1989) dalam (Saputra, 2020).



Gambar 2. 1 Model Tata Kelola Kolaboratif

Sumber: Ansell and Gash (2008)

Terdapat lima indikator yang dikemukakan oleh Anshell and Gash (2008) dalam mengukur keberhasilan kolaboratif pemerintah yaitu:

1. *Face to face dialog* (dialog tatap muka)

Dialog tatap muka, yang menggunakan pesan untuk mencapai makna bersama antara dua orang atau lebih dalam konteks di mana pembicara dan pendengar memiliki kesempatan yang sama, adalah jenis komunikasi yang penting dalam proses kerja sama. Ketika ada saling melengkapi di antara kedua belah pihak, komunikasi tatap muka terjadi. Membangun rasa saling menghormati, dedikasi pada proses, kepercayaan, dan pemahaman bersama, semuanya bergantung pada pendekatan tatap muka ini.

2. *Trust Building (Membangun Kepercayaan)*

Kepercayaan diri seseorang berasal dari kemampuannya untuk memenuhi tuntutan orang lain, bukan dari dirinya sendiri. Dalam Sudarmo, De Seve menyatakan

(2011) menyatakan bahwa adanya rasa saling percaya di antara para aktor - kepercayaan yang berakar pada hubungan profesional atau sosial dan keyakinan bahwa para aktor dapat mengandalkan pengetahuan atau upaya satu sama lain untuk mencapai tujuan - merupakan salah satu indikator efektivitas tata kelola kolaboratif. Komponen ini sangat penting bagi lembaga pemerintah karena mereka perlu merasa aman dalam kemampuan mereka untuk mengandalkan mitra di luar pemerintah dan entitas pemerintah lainnya (seperti departemen, kantor, dan badan di dalam pemerintah daerah) untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati dua belah pihak.

3. *Commitment to Process* (Komitmen dalam Proses)

Kesepakatan untuk mengikuti suatu proses untuk mencapai hasil yang diinginkan dikenal sebagai komitmen. Untuk melaksanakan tindakan kooperatif, setiap pemangku kepentingan harus diberitahu tentang tugas-tugas tertentu. Setiap mitra bertanggung jawab atas tugas tersebut dan menyadari bisnis yang mereka jalankan. Sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam semua inisiatif yang akan datang.

4. *Shared Understanding* (Pemahaman Bersama)

Menurut perspektif Ansel dan Gash dalam Rahmawati (2016), para mitra perlu mengembangkan pengetahuan yang unik tentang apa yang biasanya dapat mereka lakukan secara bersama-sama di berbagai titik dalam siklus kerja sama. Konsensus atas definisi masalah atau tujuan

Contoh lain dari pemahaman bersama adalah pengetahuan yang relevan yang diperlukan untuk menyelesaikannya. Penciptaan pemahaman bersama dapat menjadi bagian dari proses pembelajaran. Pemahaman bersama dapat dicapai melalui pendefinisian cita-cita bersama, bekerja bersama untuk mendefinisikan masalah, dan memiliki tujuan yang jelas.

5. *Intermediate Outcomes*(Hasil Sementara)

Studi kasus menunjukkan bahwa kerja sama akan terjadi jika tujuan dan keuntungannya cukup jelas dan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi. Meskipun hasil antara dapat mencerminkan keluaran nyata, hasil antara dimaksudkan sebagai hasil proses yang penting dalam pendekatan ini untuk menciptakan momentum yang dapat mengarah pada kerja sama yang efektif. Hasil-hasil ini dapat menciptakan lingkaran umpan balik positif yang memperkuat komitmen dan kepercayaan dalam proses kolaboratif.

Gagasan tata kelola kolaboratif menyoroti betapa pentingnya aktor publik dan aktor swasta (bisnis) untuk bekerja sama dengan metode dan prosedur tertentu untuk menciptakan hukum, peraturan, dan kebijakan yang sesuai untuk masyarakat umum. Menurut Ansell dan Gash, tata kelola kolaboratif mengacu pada jenis tata kelola di mana pelaku publik dan swasta berkolaborasi dengan berbagai cara melalui prosedur tertentu untuk menciptakan hukum dan peraturan yang berkaitan dengan penyediaan barang publik.

2.1.3. Strategi Pemerintah

Ketika membahas masalah militer, kata “strategi” biasanya mengacu pada penggunaan kekuatan militer untuk memenangkan konflik. Meskipun ada berbagai macam pendapat tentang strategi di antara para ahli, semua strategi memiliki makna dasar yang sama, yaitu pencapaian tujuan yang efektif dan efisien. Sesuai dengan perspektif Argyris, dkk. (Hutapea, 2017), strategi adalah reaksi yang terus menerus dan fleksibel terhadap peluang dan bahaya eksternal, di samping kekuatan dan kelemahan internal yang mempengaruhi perubahan organisasi. Sebagai alternatif dari pernyataan Siagian (2006) bahwa strategi adalah serangkaian pilihan atau tindakan dasar yang dibuat oleh manajemen senior dan karyawan tingkat bawah agar organisasi dapat mencapai tujuannya (Witi, 2021).

Strategi kebijakan publik, ekonomi, sosial, atau politik berkaitan dengan teknik atau rencana yang digunakan pemerintah untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu. Berbagai macam topik, termasuk legislasi, program sosial, kebijakan fiskal dan moneter, dan tindakan lainnya, dapat dimasukkan dalam strategi pemerintah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pendidikan yang lebih baik, pembangunan infrastruktur, perlindungan lingkungan, serta penegakan keamanan dan stabilitas nasional adalah beberapa tujuan yang dapat dimasukkan ke dalam program pemerintah. Nilai-nilai, kepentingan, dan tujuan pemerintah sering kali tercermin dalam

Pemeriksaan terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh suatu negara atau pemerintah pada suatu saat tertentu akan menghasilkan perumusan strategi yang sering kali mencerminkan nilai-nilai, kepentingan, dan tujuan pemerintah yang bersangkutan. Seiring dengan perubahan lanskap politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan lokal dan global, taktik pemerintah juga dapat berubah.

2.1.4. Pemberdayaan Masyarakat

Dari kata bahasa Inggris “power”, pemberdayaan berarti “kekuatan” atau “kekuasaan”. Pranarka dan Vidhyandika (1996), di sisi lain, mendefinisikan pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas struktural lingkungan manusia yang adil dan beradab yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, masyarakat, negara, daerah, dunia, politik, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Dalam rangka memberikan kelompok-kelompok yang lebih lemah lebih banyak pengaruh politik dan pengaruh terhadap prosedur dan hasil pembangunan, pemberdayaan didefinisikan sebagai alokasi kekuasaan yang adil. Manfaat lebih lanjut dari pemberdayaan adalah mendorong transformasi masyarakat, memberikan kesempatan kepada mereka yang sebelumnya kurang kompetitif untuk bertindak dengan kemampuan terbaik mereka. Oleh karena itu, meningkatkan martabat mereka yang tidak mampu keluar dari kemiskinan dan kesulitan dapat dicapai melalui pemberdayaan masyarakat. Menurut Endah (2020), pemberdayaan dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan penggunaan sumber daya masyarakat untuk memampukan dan memberdayakan masyarakat.

Dibutuhkan proses untuk memberdayakan seseorang. Ada banyak tingkatan pemberdayaan, menurut Suharto (2007), antara lain: 1) Identifikasi, 2) Setelah prosedur identifikasi, kemudian masuk ke tahap perencanaan. Menemukan kebutuhan dan masalah di dalam masyarakat menjadi dasar dari proses perencanaan. Karena program yang dikembangkan selama tahap identifikasi dan perencanaan ditujukan untuk masyarakat, maka masyarakat tentu saja dilibatkan dalam proses implementasi. Prosedur 4) Pemantauan dan Evaluasi digunakan untuk menilai efektivitas program dan melacak perkembangan masyarakat setelah program dilaksanakan. Menurut Maryani dan Nainggolan (2019), penilaian adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan tingkat perubahan yang telah dialami masyarakat.

2.2. Peneliti Terdahulu

Tabel 2. 1. Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yusuf Fadil , Adie Dwiayanto Nurlukman (2018) (Scpus)	<i>Government Collaboration in Empowermen t? A Collaborative Framewoork for the Government in</i>	Kuallitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi akademik masih sangat minim. • Semua pihak bekerja hanya terpaku pada

		<i>Empoweing Coastall Communities</i>		<p>tugas dan perannya masing-masing dan sangat minim koordinasi satu sama lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya keterlibatan lembaga lain dan mitra lain dalam program GerbangMapan menyebabkan alur pelaksanaan dan pemantauan keberlanjutan program dianggap kurang berpengaruh terhadap keberhasilan program yang diukur dari keberhasilan penetapan tiga pilar
2.	Ayub Adi (2024)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Pengembangan Ekonomi Rakyat	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Pada tahun 2019 dinas pemberdayaan masyarakat dan kampung menggandeng yayasan pengembangan kesejahteraan masyarakat (YAPKEMA) untuk melakukan dialog tatap muka dalam Meningkatkan

		<p>Berbasis Potensi Lokal di Kabupaten Paniai</p>	<p>kemampuan penanaman kopi, maka dilakukanlah serangkaian dialog interaksi berupa pelatihan, penyediaan peralatan, dan bimbingan kepada kelompok petani kopi yang menjadi target.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Paniai Satu Data BAPPEDA tahun 2022, terdapat kendala dalam membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini terlihat dari kenyataan bahwa sebagian besar bibit kopi yang dibagikan tidak ditanam oleh masyarakat, mungkin karena kurangnya kepercayaan terhadap program pemerintah.
--	--	---	---

3.	Mahadiansar, Alfiandri, Muhammad Syuzairi (2023)	<i>Analysis of Collaborative Governance in Tourism Based on Coastal Community Empowerment in Indonesia</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan dialog tatap muka dilakukan antara perwakilan masyarakat pesisir, pengusaha lokal, pemerintah daerah, dan tim program. Dialog tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan masyarakat lokal di sektor pariwisata dan mencari solusi bersama untuk mengatasi permasalahan tersebut. • Masyarakat pesisir merasa kurang terlibat dalam pariwisata. Mereka berpendapat bahwa pengelolaan pariwisata yang ada tidak melibatkan mereka secara aktif dan mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup dari pariwisata di desanya. Selain itu, mereka juga meyakini tidak semuanya lokal
----	--	--	------------	--

				<p>pengusaha menghormati budaya dan kebiasaan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pada tahun 2017, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI bekerja sama dengan CTC (Coral Triangle Center), organisasi masyarakat sipil, pariwisata lokal untuk mengembangkan proyek pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat pesisir di Taman Nasional Karimunjawa, Jawa Tengah. CTC telah membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat lokal di Karimunjawa melalui program pelatihan kewirausahaan, pengelolaan lingkungan, dan pelestarian budaya.• Proses tata kelola kolaboratif dalam
--	--	--	--	--

				program ini diawali dengan mengadakan forum diskusi antar pemangku kepentingan untuk berbagi informasi dan pandangan.
4.	Muhammad Hidayat Djabbari, Jeri M, Robby, Dewi Sulfa Saguni (2023)	<i>Collaborative Governance Trust Building Indicator In The Community Empowerment Area Development Program "Fish Apartemen" In Malili District.</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Trust Building Kurangnya proses pendanaan dan pencairan yang transparan membuat pemerintah dan masyarakat sulit mempercayai PT. Vale dalam pelaksanaan program pengembangan kawasan pemberdayaan masyarakat (PKPM) melalui "Apartemen Ikan" di Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.
5.	Farah Fatika Sari (2022)	<i>Collaborative Governance in Kelompok Wanita Tani (KWT) Women's Empowerment</i>	Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> Collaborative governance proses belum merata pada program KWT di Kota Cilegon. Hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya jadwal

		<p><i>Programs to Realize Food Security in Cilegon City</i></p>	<p>monitoring dan evaluasi bantuan modal KWT yang diberikan kepada seluruh KWT di Kota Cilegon untuk melaksanakan program-program guna mewujudkan ketahanan pangan keluarga, kurangnya pemeliharaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Share Understanding Partisipasi setiap anggota Kelompok Wanita Tani, masih kurangnya dukungan dari pemerintah kecamatan karena kurangnya pemahaman tentang peran dalam program KWT, masih terdapat program KWT yang tidak menghasilkan manfaat jangka panjang.
--	--	---	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Kolaborasi antar pelaku yang berkolaborasi menyebabkan program hanya berjalan pada awal program. • Intermediate Outcomes Belum ada produk inovasi panen dari seluruh KWT di Kota Cilegon.
6.	Nopriono, Suswanta (2019)	Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo	Deskripsi Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Diskusi langsung dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Desa, dan Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bayu Lestari merupakan bagian dari pendekatan tata kelola kolaboratif. Ada dua metode yang digunakan oleh Pemerintah Desa Hargomulyo untuk memberdayakan masyarakat melalui budidaya ikan gurame, yaitu metode formal dan informal.

				<ul style="list-style-type: none">• Untuk meningkatkan rasa saling percaya di antara para aktor kolaboratif dalam pelaksanaan tata kelola kolaboratif, dialog sering dilakukan di antara mereka dalam bentuk budidaya formal dan informal. Hal ini menjaga komunikasi antar aktor dan menumbuhkan rasa saling percaya antar aktor dalam pelaksanaan kolaborasi melalui intensitas pertemuan dan kegiatan dialog yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.• Komitmen proses (process commitment) dalam tata kelola kolaboratif
--	--	--	--	---

				<p>selama penerapan tata kelola di lapangan</p> <p>Kepercayaan yang kuat di antara masing-masing pelaku kolaborasi dengan sendirinya melahirkan program budidaya ikan antara Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bayu Lestari, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, dan Pemerintah Desa Hargomulyo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui pertemuan-pertemuan rutin, baik resmi maupun tidak resmi, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Pembudidaya Ikan Mina Bayu Lestari, dan Pemerintah Desa Hargomulyo akan mendiskusikan kesepahaman-kesepahaman yang muncul dalam pembudidayaan ikan gurame, baik secara informal maupun formal, masih terdapat beberapa kelemahan implementasi yang membuat proses pelaksanaan collaborative governance dinilai masih kurang sempurna.
--	--	--	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> • Keterlibatan pihak swasta dalam proses pembuatan hanya sampai pada tahap penjualan Toke, yang menjadi sorotan utama.
7.	Lilieek Winarni, Ika Nur Afni, Riska Wirawan (2021)	Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas di Desa Maron Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo	Kualitatif,	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborative Governance dalam pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron yang terjalin antara Pemerintah Desa Maron, Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial

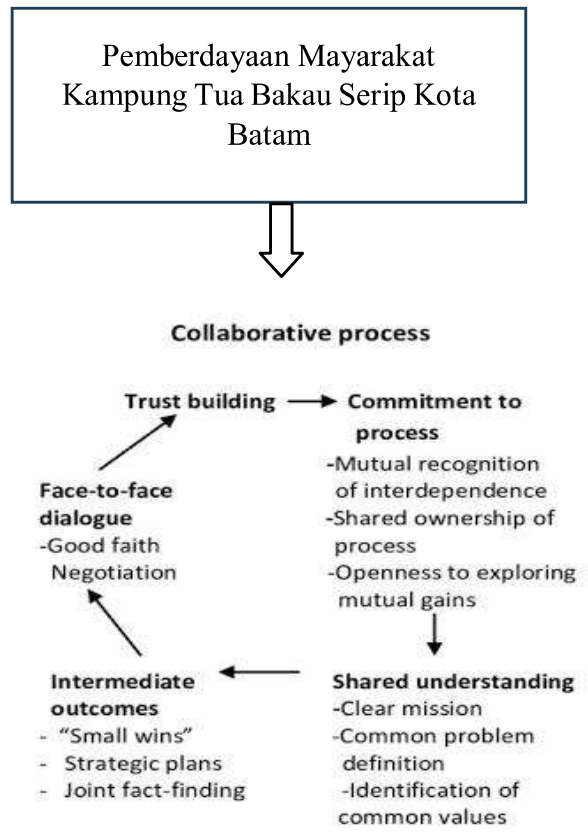
				<p>Kabupaten Temanggung, KSM Tali Kasih serta komunitas lokal belum optimal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Comitment to process Kurang adanya komitmen dari beberapa stakeholder • Belum ada kepercayaan diantara aktor
--	--	--	--	--

Merujuk pada tujuh penelitian terdahulu tersebut fokus pada konsep kolaborasi atau tata kelola kolaboratif dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Meskipun konteksnya berbeda, yakni pemberdayaan masyarakat pesisir, penanggulangan kemiskinan, pengembangan pariwisata, dan program-program spesifik seperti pengembangan area pemberdayaan masyarakat, semua penelitian menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor lainnya dalam mencapai tujuan tersebut. Selain itu, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk menerapkan prinsip kolaborasi, masih terdapat tantangan seperti kurangnya koordinasi, kepercayaan yang belum terbentuk dengan baik, kurangnya pemantauan dan evaluasi, serta kesenjangan dalam implementasi di lapangan. Dengan demikian, penelitian-penelitian ini menyumbangkan wawasan

yang penting dalam mengidentifikasi masalah dan potensi solusi dalam konteks pemberdayaan masyarakat.

Koordinasi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, kelompok masyarakat, dan organisasi akademik dalam berbagai program masih sangat minim, dengan masing-masing pihak bekerja secara terpisah tanpa sinergi yang baik. Akibatnya, keberhasilan program sering kali terganggu. Data menunjukkan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah, seperti terlihat pada program penanaman kopi di Paniai. Meskipun ada contoh kolaborasi yang baik, seperti proyek pariwisata di Karimunjawa yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, banyak program lainnya masih menghadapi masalah koordinasi, monitoring, dan evaluasi, seperti program KWT di Cilegon dan pemberdayaan masyarakat dengan disabilitas di Desa Maron. Kurangnya pemahaman, dukungan, dan kepercayaan antara aktor-aktor yang terlibat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan collaborative governance di berbagai daerah.

2.3. Kerangka Pemikiran



Sumber : (Anshel & Gash 2008)



Kolaboratif antara pemerintah dan
pihak swasta perlu di kembangkan
dan ditingkatkan agar
pemberdayaan Masyarakat dapat
tercapai secara maksimal.



Strategi Kolaboratif
Pemberdayaan Masyarakat
Kampung Tua Bakau Serip
Kota Batam